

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, Edisi Ketiga. SAGE.
- Crouch, H. A. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Indrawan, J. (2019). *Pengantar studi keamanan*. Depok: Rajawali Pers.
- Crouch, H. A. (2010). *Political reform in Indonesia after Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS press.
- May, R., & Selochan, V. (2004). *The military and democracy in Asia and the Pacific* (p. 197). ANU Press.
- Perlmutter, A. (1977). *The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susdarwono, E. T., SH, M. S., & Alma Wiranta, S. H. (2025). *Pemikiran Di Sekitar Revisi Undang-Undang TNI*. Goresan Pena.
- Widoyoko, D., & Pontoh, C. H. (2003). *Bisnis militer mencari legitimasi* (pp. 1-90). Indonesia Corruption Watch (ICW): National Democratic Institute (NDI).
- Lalola E,K, (2023) *Rangkap Jabatan Aparat Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN*. Indonesia Corruption Watch (ICW).

Perundang-undangan

Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI Dan Polri

INDONESIA, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

BPK RI (2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

BPK RI (2023). UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Tugas Akhir

Kamil, H. N. (2009). *Militer Dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan Tni Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*.

Lumintang, I. (2024). *Rangkap Jabatan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Mochtar, A. S. (2021). *Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Prayogo, D. S. (2021). *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Di Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara Oleh Perwira Tinggi Tni/Polri Yang Aktif* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

Segara, N. H. T. *Penempatan Prajurit Tni Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Siregar, D. R. S. *Analisis Kebijakan Penghapus Tenaga Honorer Bidang Pendidikan Tahun 2023* (Master's Thesis, Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jurnal

- Rikan, K. (2015). Konsep Dwifungsi Abri Dan Perannya Dimasa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Ujung, F., Hasan, H., Kumanireng, R. M., Nenabu, R. I., Alelang, Y. T., Nitbani, Y. E. E., & Mas'ud, F. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Uu No 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 309-315.
- Suryawan, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi Abri. *Jurnal Santiaji Pendidikan (Jsp)*, 10(2).
- Sofuan, T. K. (2023). Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi Abri Pada Masa Orde Baru. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 9(2), 162-170.
- Wahyudi, A., & Safriani, A. (2023). Problematika Rangkap Jabatan Asn, Tni, Dan Polri Menjadi Komisariss Di Badan Usaha Milik Negara. *Alau Ddin Law Development Journal*, 5(3), 455-468.
- Aminullah, A., & Gani, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit Tni Aktif Yang Menduduki Jabatan Komisariss BumN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(3), 193-200.
- Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). Hubungan Politik, Polisi Dan Militer Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 1-10.
- Rabasa, A., & Haseman, J. (2002). *The Military And Democracy In Indonesia: Challenges, Politics, And Power*. Rand Corporation.

- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi Abri: Melacak Sejarah Keterlibatan Abri Dalam Kehidupan Sosial Politik Dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23-46.
- Wijayanti, O., Indra, M., & Zulwisman, Z. (2025). Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Tni Dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. C), 175-186.
- Rikan, K. (2015). Konsep Dwifungsi Abri Dan Perannya Dimasa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. *Universitas Pgri Yogyakarta*.
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi Tni Dari Masa Ke Masa. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 4(1), 154-179.
- Dahoklory, M. V., & Wattimury, E. (2024). Problematika Pengangkatan Prajurit Tni Sebagai Penjabat Kepala Daerah. *Perspektif*, 29(1), 46-53.
- Nasional, B. P. H. (2019). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Nur Rouf Rizqi Ramadhani (2025). Mengulas Dinamika Keterlibatan Militer dalam Perusahaan BUMN Serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Perusahaan (Studi Kasus pada PT Pindad dan PT Pelindo). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer Di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274-289.
- Novavah, M. H. (2020). Analisis Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tni Dalam Lembaga Pemerintahan Negara. *Rechtenstudent*, 1(1), 1-7.

- Firzatullah, F. A. (2023). *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tni/Polri Aktif (Studi Kasus Brigadir Jendral Tni Andi Chandra As' Aduddin Sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis Penempatan Prajurit Tni Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 5(2), 82-94.
- Almatin, R. W. M. *Kewenangan Dpr Dalam Pengangkatan Panglima Tni (Tinjauan Yuridis Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)* (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah).
- Triatmaja, M. T. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit Tni Yang Menduduki Jabatan Bumh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni* (Doctoral Dissertation, Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Gunaryono, N. (2009). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Gunawan, A. B. Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 35-54.
- Basuki, A. Y. (2014). Reformasi Tni: Pola, Profesionalitas, Dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 19(2), 10-41.
- Harris, A. (2023). *Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Berdasarkan Good Coporate Governance* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Effendy, M. (2025). *Profesionalisme Militer Profesionalisasi Tni*. Umpress.
- Rohman, N. (2025). *ANALISIS KEDUDUKAN DAN PENGATURAN TNI-POLRI PERSPEKTIF TEORI SINKRONISASI HUKUM DAN DEMOKRASI (Studi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Ikhsan Yosarie (2023). Analisis Penempatan Prajurit Tni Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 2023, Vol. 5 (2), 82-94
- Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Dan Tantangannya Pada Masa Depan Nkri. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550
- Fadilah, E. M., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil-Militer Terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Di Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 34-47..
- Sanjoyo, M. P. (2023). Diktat Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik. *Fakultas Ushuludin, Adab, Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq*.
- Gruber, V. (2015). Revisiting Civil-Military-Relations Theory. *Small Wars Journal*.
- Feaver, P. D. (1999). Civil-Military Relations. *Annual Review Of Political Science*, 2(1), 211-241.
- Kümmel, G. (2002). The Military And Its Civilian Environment: Reflections On A Theory Of Civil-Military Relations. *Connections*, 1(4), 63-82.

- Feaver, P. D. (1996). The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, And The Question Of Civilian Control. *Armed Forces & Society*, 23(2), 149-178.
- Brooks, R. A. (2019). Integrating The Civil–Military Relations Subfield. *Annual Review Of Political Science*, 22(1), 379-398.
- Bellin, E. (2012). Reconsidering The Robustness Of Authoritarianism In The Middle East: Lessons From The Arab Spring. *Comparative Politics*, 44(2), 127-149.
- Maurer, D. (2025). The Generals' Constitution In Extremis: Civil Rights, Civilian Supremacy, And A National Security Commitment. *Civilian Supremacy, And A National Security Commitment" Most Severely Tested"(January 26, 2025)*.
- Feaver, P. D. (2003). *Armed Servants: Agency, Oversight, And Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Suryadinata, L. (2007). The Decline Of The Hegemonic Party System In Indonesia: Golkar After The Fall Of Soeharto. *Contemporary Southeast Asia*, 333-358.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, And Ideology*. Flipside Digital Content Company Inc..
- Perlmutter, A. (1986). The Military And Politics In Modern Times: A Decade Later. *The Journal Of Strategic Studies*, 9(1), 5-15.
- Honna, J. (2019). Civil-Military Relations In An Emerging State: A Perspective From Indonesia's Democratic Consolidation. *Emerging States At Crossroads*, 255-270.
- Khan, S. (2013). The Military And Economic Development In Pakistan. In *Capitalism On Trial*. Edward Elgar Publishing.
- Stein, P. T. (2016). The Role Of The Military In Myanmar's Political Economy (Doctoral Dissertation, Monterey, California: Naval Postgraduate School).

Mietzner, M. (2023). Democracy And Military Oversight In Crisis: The Failed Civilianisation Of Indonesia's Ministry Of Defence. *Journal Of Asian Security And International Affairs*, 10(1), 7-23.

Dokumen Lainnya

Website

https://www.kompas.id/artikel/2500-prajurit-aktif-di-jabatan-sipil-imparsial-ganggu-birokrasi-dan-lemahkan-profesionalisme-tni?utm_source

<https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perwira-tni-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-di-kementerian-dan-bumn-122235>

<https://www.tempo.co/politik/perjalanan-tni-berganti-ganti-nama-bkr-tnr-tni-abri-135642>

<https://tirto.id/saat-jenderal-tni-menjabat-staf-khusus-menteri-sandi-gggW>

https://pindad.com/erick-thohir-angkat-jenderal-tni-maruli-simanjuntak-sebagai-komisaris-utama-pt-pindad?utm_source

<https://m.beritajakarta.id/read/123359/mayjen-tni-purn-untung-budiharto-jabat-komisaris-utama-pt-transjakarta>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c203lez30qxo>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20250304/15/1844456/deretan-tni-aktif-purnawirawan-di-bumn-dari-bulog-hingga-mind-id>

<https://www.tempo.co/newsletter/peran-tentara-di-ranah-sipil-meluas-di-era-prabowo-dwifungsi-tni-bangkit-lagi--1199515>

<https://www.bulog.co.id/2025/02/13/ketika-dirut-bulog-seorang-tentara-aktif/>

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Okttober-2024-1947.pdf

<https://www.tempo.co/politik/100-hari-prabowo-pengamat-melanggengkan-militerisme-dan-impunitas--1199594>

<https://tni.mil.id/view-237872-tni-akan-bangun-22-kodam-baru.html>

<https://www.tempo.co/politik/pemerintah-tahun-ini-berencana-tambah-5-kodam-baru-berapa-jumlah-kodam-saat-ini--1205617>

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/71630/deretan-pejabat-negara-dan-bumn-berlatar-anggota-tni>

<https://www.tempo.co/kolom/dwifungsi-tni-prabowo-1199629>